



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang 79121
Telepon. (0562) 634114 Faksimile. (0562) 634114

Laman : www.lh.singkawangkota.go.id Pos-el : dislh@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/05/SET.01/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Februari 2025

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19670101 198603 2 005

Lampiran
 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
 Singkawang
 Nomor 500.12.1/05/SET.01/2025
 Tentang
 Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota
 Singkawang
 Tanggal 4 Februari 2025

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
				Soft Copy	Hard Copy	
A						
Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik						
Mengumumkan Informasi berupa deskripsi tentang nama, alamat, struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dan disediakan melalui website Badan Publik dan PPID						
1	a. Profil Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
Mengumumkan Informasi LHKPN Pejabat Daerah yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK untuk disediakan/diumumkan pada website Badan Publik dan PPID (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari :						
2	a. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
	b. Mengumumkan informasi jumlah dan presentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
B						
Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi						
1	Mengumumkan program atau kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, penanggung jawab/pelaksana program, sumber anggaran, besaran anggaran	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel
2	Mengumumkan program atau kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, penanggung jawab/pelaksana program, sumber anggaran, besaran anggaran	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
3	Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan.	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel
4	Rencana Strategik Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
C	Laporan Keuangan					
	Mengumumkan dalam website Badan Publik dan PPID Informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit yang terdiri dari :					
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
2	Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
3	Daftar Aset dan Inventaris	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
4	Neraca	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
5	Ringkasan RKA OPD	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
6	Ringkasan RKA PPKD	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
7	Informasi realisasi atau penyerapan anggaran (RFK)	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
D	Pengadaan Barang dan Jasa					
	Menyediakan Lima (5) dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diaudit/verifikasi					
I	Tahap Perencanaan, meliputi :					
1.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP	PPID Pelaksana	Tahun n-1	√	√	-
II	Tahap Pemilihan, meliputi :					
1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-
3.	Spesifikasi Teknis	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-
4.	Rancangan Kontrak	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-
5.	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	√	√	-

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Keterangan	
7.	Daftar Kuantitas dan Harga	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
8.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
11.	Dokumen Penawaran Administratif	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
12.	Surat Penawaran Penyedia	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
13.	Sertifikat atau Licensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Keayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
15.	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
17.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
18.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
19.	Surat Penunjukan Penyedia Batrang/Jasa (SPPBj)	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
Menyediakan dokumen surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya						
20.	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	-
21.	Surat Perjanjian Swakelola	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	-
22.	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	PPID Pelaksana (PPK)	Berjalan (n)	✓	✓	-
III Tahap Pelaksanaan, meliputi :						
1.	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dicekualikan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
2.	Surat Perintah Mulai Kerja	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
3.	Surat Jaminan Pelaksanaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
4.	Surat Jaminan Uang Muka	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
5.	Surat Jaminan Pemeliharaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
6.	Surat Tagihan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-
7.	Surat Pesanan E-purchasing	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	-

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Keterangan
8.	Surat Perintah Membayar	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
9.	Surat Perintah Pencairan Dana	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
10.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
11.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
12.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
13.	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
14.	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	-
E	Informasi Terbuka Lainnya				
	Mengumumkan Ringkasan Tentang Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID) yang memuat tentang :				
1.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
3.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
4.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
	Mengumumkan Prosedur Pelayanan Akses Informasi Publik yang dapat disediakan berupa Poster/Pengumuman/Infografis di Website PPID dan/atau media sosial Badan Publik				
5.	Tata cara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
6.	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
7.	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
8.	Tata cara atau prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Keterangan
A. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan					
1.	Profil pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
2.	Data statistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	-
B. Informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik					
1.	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel sekurang-kurangnya membuat informasi tentang Nomor, Judul Draft, Status
2.	Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel sekurang-kurangnya membuat informasi tentang Nomor, Judul Draft, Status

C Informasi Setiap Saat Lainnya						
1.	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	Informasi berupa Pengumuman / Surat Edaran
2.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	Informasi berupa Pemadaman Listrik, PDAM, Gangguan Jaringan Internet, Pengalihan Arus Lalu Lintas dan lain-lain.

Singkawang, 4 Februari 2025

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos

 Kepala Dinas

Rethana Utama Muda / (IV/c)

 NIP. 19670101 198603 2 005